

ANALISIS SISTEMATIS TERHADAP MODEL ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DI INDIA DAN INDONESIAPramesti Dwipayana<sup>1</sup>, Aminullah<sup>2</sup><sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia<sup>2</sup>Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, IndonesiaEmail : [pramestidwipayana08@gmail.com](mailto:pramestidwipayana08@gmail.com)

E-Issn: 3063-8313

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

**Abstract :**

*Development administration plays a crucial role in determining the success of national development, particularly in addressing the challenges of inequality, the effectiveness of public services, and governance. India and Indonesia, as developing countries with large populations, have distinct government systems and therefore implement different development administration models. This study aims to systematically analyze and compare the development administration models implemented in India and Indonesia. This study uses a qualitative approach with a comparative descriptive method. Data were obtained through a literature review sourced from scientific journals, policy documents, and official government publications. The analysis was conducted by describing each country's development administration model and then comparing their institutional structures, division of authority, and development implementation mechanisms. The results show that India tends to implement a centrally coordinated development administration model within a federal framework, with flexibility in implementation at the state level. Meanwhile, Indonesia has developed a decentralized development administration model with broad authority for local governments. These differences affect the effectiveness of coordination, institutional capacity, and the equitable distribution of development outcomes. This study concludes that no single development administration model is entirely ideal, as its success is strongly influenced by the institutional context and government capacity. These findings are expected to provide conceptual contributions to the development of development administration studies and serve as a basis for consideration in formulating development policies in developing countries.*

**Keywords:** *Development administration; decentralization; national development; India; Indonesia; comparative study*

**Abstrak :**

Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan, efektivitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. India dan Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar memiliki karakteristik sistem pemerintahan yang berbeda, sehingga menerapkan model administrasi pembangunan yang tidak sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis serta membandingkan model administrasi pembangunan yang diterapkan di India dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan model administrasi pembangunan masing-masing negara, kemudian membandingkan struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa India cenderung menerapkan model administrasi pembangunan yang terkoordinasi secara terpusat dalam kerangka federal, dengan fleksibilitas pelaksanaan di tingkat negara bagian. Sementara itu, Indonesia mengembangkan model administrasi pembangunan yang berbasis desentralisasi dengan kewenangan



luas bagi pemerintah daerah. Perbedaan tersebut memengaruhi efektivitas koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan pemerataan hasil pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat satu model administrasi pembangunan yang sepenuhnya ideal, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan kapasitas pemerintahan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian administrasi pembangunan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di negara berkembang.

**Kata kunci:** Administrasi pembangunan; desentralisasi; pembangunan nasional; India; Indonesia; studi komparatif

## **PENDAHULUAN**

Administrasi pembangunan merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional karena mencakup seluruh proses perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program yang di arahkan pada kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika global dan tantangan global dan tantangan domestik, administrasi pembangunan berperan dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial ekonomi, akses layanan publik, hingga efektivitas tata kelola pemerintah. India dan Indonesia, sebagai dua negara demokrasi besar dengan jumlah penduduk signifikan, menerapkan strategi administrasi pembangunan yang berbeda namun sama-sama kompleks dalam implementasinya. (Nursahwa et al., n.d.)

Di India, administrasi pembangunan di dorong oleh lembaga-lembaga seperti NITI Aayog yang bertugas merumuskan kebijakan pembangunan strategis nasional dengan pendekatan bottom-up yang lebih inklusif di bandingkan dengan model perencanaan top down klasik. Peran lembaga ini penting dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan lintas negara bagian dan memastikan penyelarasan antara prioritas vederal dan lokal. Sementara itu Indonesia menempuh desentralisasi yang kuat dalam administrasi pembangunan untuk memberikan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan dinamika otonomi daerah yang terus berkembang sejak reformasi 1999. (Maulana et al., 2022)

Meskipun kedua negara berfokus pada tujuan yang sama yaitu pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tantangan yang dihadapi juga bersifat unik. India berjuang mengatasi ketimpangan antar wilayah dan kelompok sosial, khususnya dalam pelayanan kesehatan dan infrastruktur di daerah pedalaman. Di Indonesia, tantangan besar terletak pada kesulitan geografis sebagai negara kepulauan yang tersebar, yang mempengaruhi pemerataan layanan publik dan alokasi sumber daya pembangunan. (Nursahwa et al., n.d.)

Fenomena aktual turut memperkuat urgensi penelitian ini. Misalnya studi komparatif mengenai kesenjangan transformasi digital governance menunjukan

bahwa indonesia, india, dan negara asia tenggara lainnya berbeda dalam kesiapan institusional dan efektifitas implementasi layanan digital suatu aspek penting dalam administrai pembangunan modern. Studi ini menyoroti bahwa model desentralisasi indonesia sering menghasilkan implementasi yang terfragmentasi.

Meski sudah ada studi komparatif pada administrasi pembangunan antara indonesia dan india, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif tanpa analisis mendalam yang memetakan perbedaan struktural, mekanisme koordinasi antar tingkat pemerintah, serta dampaknya terhadap hasil pembngunan di masing-masing negara, selain itu, banyak penelitian terkini masih membdingkan kedua negara secara umum, namun belum fokus pada vriabel kunci seperti efisiensi pelyanan publik, digital governance, dan stabilitas kebijakan pembngunan jangka panjang. Pendekatan komparatif seperti ini penting untuk memperkaya literatur administrsi publik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif di konteks negara berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan “analisis sistematis terhadap model administrasi pembangunan di India dan Indonesia”, mencakup aspek kelembagaan, koordinasi inter-pemerintahan, penggunaan teknologi dalam layanan publik, serta indikator hasil pembangunan yang relevan secara empiris.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif komparatif untuk mengkaji dan membandingkan secara sistematis model administrasi pembangunan di India dan Indonesia. Data yang dihimpun dianalisis secara deskriptif guna menguraikan karakteristik, arah kebijakan, serta praktik penyelenggaraan administrasi pembangunan di masing-masing negara. Tahap selanjutnya dilakukan analisis perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, khususnya terkait struktur kelembagaan, peran aktor, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan. Temuan perbandingan tersebut kemudian ditelaah secara kritis untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan model administrasi pembangunan, sekaligus menilai dampaknya terhadap efektivitas pembangunan di kedua negara. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan memanfaatkan literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber resmi pemerintah, yang dianalisis secara cermat untuk memastikan relevansi, akurasi, dan konsistensi informasi. Seluruh tahapan metode ini dirancang sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perbedaan model administrasi pembangunan di India dan Indonesia, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian administrasi pembangunan dalam konteks negara berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model administrasi pembangunan di india**

Model administrasi pembangunan di India menggabungkan prinsip desentralisasi kelembagaan dengan struktur federal yang kuat, di mana tanggung jawab pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sesuai ketentuan konstitusi. Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional, sementara unit administratif negara bagian dan lokal memiliki tanggung jawab operasional dalam perencanaan dan penyediaan layanan publik. Sistem ini menempatkan Panchayati Raj Institutions dan lembaga lokal lain sebagai komponen penting dalam penyusunan rencana pembangunan di tingkat desa dan kota. Proses ini mencerminkan pendekatan distribusi fungsi administratif dari pusat ke bawah sesuai dengan prinsip demokrasi dan otonomi lokal. Sementara keterlibatan lembaga lokal diharapkan memperbaiki responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, praktek implementasi sering dipengaruhi oleh kapasitas administratif dan sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah. Selain itu, India juga memanfaatkan teknologi administratif melalui inisiatif digital seperti National e-Governance Plan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan transparansi. Inisiatif tersebut bertujuan mempermudah masyarakat menerima layanan pemerintah secara cepat dan efisien melalui platform elektronik, meskipun tantangan seperti disparitas infrastruktur teknologi masih menjadi kendala dalam implementasi menyeluruh. Secara keseluruhan, model administrasi pembangunan di India menekankan perpaduan antara perencanaan terpusat berbasis visi nasional dengan fleksibilitas pelaksanaan di tingkat lokal, tetapi masih menghadapi isu kesenjangan kapasitas antara unit pemerintahan yang berbeda. (Decentralised Governance And Planning In India, n.d.)

### **Model Administrasi Pembangunan di Indonesia**

Indonesia menerapkan model administrasi pembangunan yang didasarkan pada desentralisasi politik dan administratif yang kuat sejak reformasi otonomi daerah. Pengaturan ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota untuk merencanakan, membiayai, dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Konsep ini diatur melalui amandemen konstitusi pasca-1998 dan regulasi desentralisasi yang memberi ruang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan publik secara mandiri. Dalam praktek, desentralisasi di Indonesia memungkinkan daerah mengembangkan inovasi kebijakan yang sesuai karakteristik masing-masing wilayah, seperti penggunaan sistem e-government untuk memperbaiki transparansi layanan publik dan penggunaan big data untuk keputusan berbasis bukti. Namun, ketimpangan sumber daya antar daerah sering kali memengaruhi hasil pembangunan, di

mana beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, keterampilan SDM, dan kapasitas institusional.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kapabilitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam tindakan lokal yang efektif. Meskipun model ini mempromosikan keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas lokal, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi tantangan utama.

Dengan demikian, model administrasi pembangunan di Indonesia berakar kuat pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan fleksibilitas operasional tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pemerataan kapasitas administratif di seluruh wilayah. (Heryani & Iskandar, 2025)

### **Analisis Perbandingan Model Administrasi Pembangunan**

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pola administrasi pembangunan yang berbeda namun masing-masing mencerminkan karakter kelembagaan dan konteks sejarahnya. India memadukan struktur federal dengan sistem hierarki administratif yang jelas, tetapi tetap mendelegasikan fungsi tertentu ke tingkat lokal untuk menyesuaikan kebutuhan daerah. Model ini berupaya menjaga koherensi kebijakan pembangunan nasional sembari memberi ruang bagi pemerintahan lokal untuk mengadaptasi strategi. Namun, ketimpangan antar negara bagian dapat menjadi hambatan bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan secara merata. (Decentralised Governance And Planning In India, N.D.)

Sementara itu, Indonesia menerapkan desentralisasi luas, di mana pemerintah daerah diberi wewenang besar dalam pengambilan keputusan pembangunan. Model ini memfasilitasi inovasi kebijakan dan partisipasi lokal, tetapi kompleksitas koordinasi antar tingkat pemerintahan serta disparitas sumber daya tetap menjadi isu yang memengaruhi kualitas pelayanan publik di beberapa daerah. (Decentralised Governance And Planning In India, N.D.)

Perbedaan mendasar antara kedua model ini terletak pada tingkat distribusi kewenangan dan kapasitas administratif. India lebih menekankan harmonisasi visi pembangunan nasional dengan otonomi daerah dalam kerangka federal, sedangkan Indonesia menghadirkan desentralisasi kuat yang menempatkan daerah sebagai pelaksana utama pembangunan. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan konteksnya sendiri: model India mendukung konsistensi kebijakan nasional, sementara model Indonesia mempromosikan responsivitas lokal terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model administrasi pembangunan yang sempurna. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada konteks politik, struktur kelembagaan, dan kapasitas pemerintahan di setiap tingkatnya. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan bagi kedua negara perlu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan kelembagaan masing-masing untuk meningkatkan

**As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)**

<https://ojssulthan.com/asje>

efektifitas pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Decentralised Governance And Planning In India, N.D.)

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pembangunan di India dan Indonesia sama-sama menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Meski demikian, cara penerapannya berbeda. India masih mengandalkan sistem administrasi yang cenderung terpusat dengan peran birokrasi yang kuat, sedangkan Indonesia mengembangkan model pembangunan melalui desentralisasi dan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Perbedaan pendekatan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas aparatur, serta kemampuan kebijakan untuk menjawab kebutuhan di tingkat lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan memerlukan dukungan tata kelola yang kuat agar dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan. Sementara itu, pengalaman India menunjukkan bahwa sistem birokrasi yang solid mampu menjaga konsistensi kebijakan, namun tetap membutuhkan ruang partisipasi dan penyesuaian kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi kelembagaan menjadi aspek penting dalam pengelolaan administrasi pembangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Decentralised Governance And Planning In India. (n.d.).
- Heryani, A., & Iskandar, A. (2025). Dynamics of Decentralization Policy Implementation in Strengthening Public Services in Indonesia. *PUBLICA*, 17(2), 634–661. <https://doi.org/10.15575/jpan.v17i2.52155>
- Maulana, A., Utami, C., & Hanafi, L. I. (2022). THE PROGRESS OF REGIONAL AUTONOMY POLICY AND DEVELOPMENT ATTAINMENTS: INDONESIA'S EXPERIENCE (1999-2021) (Vol. 19).
- Nursahwa, S., Mardiah, D., Renggani, F. P., Nuraeni, N., Adli Mu'afa, M., Yusup, A. M., & Apriliyani, V. (n.d.). Perbandingan Administrasi Pembangunan Indonesia Dan India (Vol. 3, Issue 11).
- Sommer Harrits, G. (2011). More than method?: A discussion of paradigm differences within mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 5(2), 150–166.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010a). Putting the human back in "human research methodology": The researcher in mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, Vol. 4, pp. 271–277. Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)  
<https://ojssulthan.com/asje>

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010b). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. sage.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2008). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. Sage publications.